

## EVALUASI PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DALAM PERSPEKTIF *FLOOD RISK MANAGEMENT*

Oscar Radyan Danar<sup>1(a)</sup>, Tommy Anggriawan<sup>2(b)</sup>, Dellarizki Prameisa<sup>2(c)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya  
<sup>a)</sup>oscar@ub.ac.id, <sup>b)</sup>tommyanggriawans@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### **Article History:**

Dikirim:

05-08-2022

Diterbitkan Online:

28-11-2022

#### **Kata Kunci:**

Desa Tangguh Bencana,  
Manajemen Risiko Banjir,  
Kesiapsiagaan Komunitas

#### **Keywords:**

*Village Disaster Resilience,  
Flood Risk Management,  
Community Preparedness*

#### **Corresponding Author:**

oscar@ub.ac.id

#### **DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.492>

### ABSTRAK

Kabupaten Pacitan termasuk peringkat lima teratas kota/kabupaten dengan risiko bencana tinggi di Jawa Timur. Didalam kabupaten tersebut, salah satu wilayah dengan ancaman risiko bencana banjir adalah Desa Sironboyo yang terletak di antara Sungai Grindulu dan Sungai Jelok. Upaya mempersiapkan ketahanan warga di tengah ancaman banjir terwujud melalui pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh Bencana merupakan bentuk manajemen risiko banjir (FRM) sebagai pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan membangun kemandirian dan adaptasi warga desa. FRM adalah landasan analisis-teoritis yang digunakan bersanding dengan model evaluasi Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Pendekatan deskriptif-kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara kronologis evaluasi program desa tangguh bencana yang menemui beberapa hambatan seperti kurangnya partisipasi aktif masyarakat desa dan karang taruna serta kurangnya kapasitas tim relawan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi ulang pelaksanaan program desa tangguh bencana secara efektif sesuai dengan kerangka FRM untuk memaksimalkan ketahanan masyarakat di tengah ancaman bencana banjir yang mengintai sepanjang tahun

### ABSTRACT

*Pacitan district is one of the five districts included in the highest disaster risk region in East Java. One of the area with a big threat of destructive flood disaster is Sironboyo Village, which is located between Grindulu and Jelok River. An attempt to improve community preparedness in the midst of flood hazard are carried out through Village Disaster Resilience Program. Village disaster resilience program is a form of flood risk management (FRM) as a community-based disaster risk reduction by building up self-sufficiency and adaptation. FRM is a theoretical analytic-based that is used in conjunction with Context, Input, Process, and Product (CIPP) evaluation model. The qualitative-descriptive approach was chosen to describe chronologically the evaluation of village disaster resilience program, which encounters several obstacles such as lack of active community and youth participation and under-capacity of the volunteer team. This study offers a reconstruction of village disaster resilience program execution in accordance with the FRM framework to effectively maximize community readiness over the threat of flood hazard that stakeout throughout a year.*

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang dengan teritorial wilayah yang cukup luas, Indonesia menempati peringkat ke 27 sebagai negara dengan potensi ancaman bencana tertinggi pada World Risk Report 2019 (UNDRR, 2020). Hingga saat ini hasil survey yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa masih terdapat 97% populasi masyarakat menempati tanah yang rawan terjadi bencana alam, seperti banjir dengan perkiraan sebesar 63,4% dari populasi berpotensi merasakan peristiwa ini. Dilanjutkan dengan gempa sebagai ancaman bagi 62,4% populasi, 40,8% bagi tanah longsor, 4,2 juta bagi tsunami, dan 3,9 juta bagi aktivitas vulkanik (BPS, 2018). Tingginya potensi risiko bencana di Indonesia didapatkan melalui perhitungan jumlah manusia yang terancam kehilangan jiwa apabila terjadi bencana (BNPB, 2016). Peningkatan kejadian bencana yang terjadi setiap tahun, turut berdampak pada peningkatan jumlah korban bencana serta nilai kerusakan dan kerugian di beberapa sektor.

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia, kejadian bencana di Indonesia pada rentang tahun 2005 hingga 2015 sebesar 78% teridentifikasi sebagai bencana hidrometeorologi dengan 11.648 kejadian, sedangkan 22% merupakan bencana geologi dengan 3.810 kejadian (Amri dkk, 2016). Tingginya tingkat persentase bencana hidrologi tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang lebih didominasi oleh bentang-bentang kepulauan dengan perairan sebagai instrumen utama di wilayah tersebut. Terlebih lagi, adanya kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi juga menyebabkan tingginya volume air di sejumlah daerah. Akibatnya, banjir menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi dengan tingkat persebaran merata di hampir semua provinsi.

Kejadian banjir di Indonesia pada umumnya memiliki skala yang berbeda-beda dari mulai skala bencana ringan hingga dapat menjadi skala bencana nasional dengan total kerusakan yang cukup parah. Adanya rentang skala ini akan mempengaruhi opsi tindakan yang harus diambil oleh pemerintah, misalnya ketika banjir tersebut hanya berskala ringan, maka pemerintah daerah bersama masyarakat setempat akan menjadi aktor utama dalam penanganan bencana tersebut. Di sisi lain, apabila banjir tersebut berpotensi atau telah

mengakibatkan kerusakan yang cukup parah maka pemerintah provinsi atau pusat dapat membantu untuk menangani bencana tersebut.

Penentuan skala bencana yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan. Di sisi lain, batasan untuk menentukan skala aktor yang terlibat juga berfungsi untuk memudahkan proses pengambilan keputusan dengan tepat, sehingga potensi risiko yang lebih besar dapat dihindari. Namun menurut Bahadori dkk (2015) adanya koordinasi yang baik di jajaran manajerial masih belum cukup untuk implementasi kegiatan manajemen risiko yang maksimal. Bahadori dkk (2015) melanjutkan, bahwa adanya ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat di lingkungan operasional adalah faktor pendukung yang turut menjadi penentu keberhasilan penanganan risiko bencana. Oleh karena itu, untuk menjawab fenomena tersebut, BNPB membentuk Peraturan Kepala (PERKA) BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman umum pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana.

Pasca dikeluarkannya PERKA tersebut, beberapa penelitian dari sejumlah disiplin ilmu memaparkan hasil analisis terhadap implementasi dari program tersebut, seperti Setyawani dan Pambudi (2020) yang menyebutkan bahwa meskipun program DESTANA di desa Argomulyo, Kab. Sleman telah berjalan dengan baik namun kurangnya kapasitas dan sarana yang dimiliki oleh pemerintah desa setempat mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Rinawati dan Sukmawati (2020) menyebutkan bahwa program DESTANA yang dilaksanakan di desa Kembang kab. Pacitan menghasilkan temuan berupa implementasi yang telah efektif, namun kedepannya masih diperlukan adanya tim khusus dari gabungan stakeholder untuk memperkuat mekanisme koordinasi dalam memaksimalkan penanganan risiko bencana di desa tersebut.

Selain kedua penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Djunaedi dan Swasto (2016) di desa Poncosari dan Srigading, Kab. Bantul juga masih memiliki hasil temuan yang bervariasi dimana di desa Poncosari pelaksanaan DESTANA terbilang berjalan dengan baik meskipun hanya secara normatif. Adapun di desa Srigading hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

DESTANA masih terbilang belum cukup efektif dengan dibuktikan pada beberapa indicator capaian yang belum tercapai. Dari serangkaian hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa efektifitas pelaksanaan DESTANA masih cukup bervariasi dan tidak konsisten di satu desa dan desa lain. Artinya, penelitian lanjutan di daerah yang berbeda sangat penting untuk dilakukan, guna mengetahui hasil temuan dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk meneliti program DESTANA di salah satu desa lain, yakni desa Sirnobojo, kab. Pacitan, sebagai salah satu desa dengan potensi rawan banjir yang tinggi.

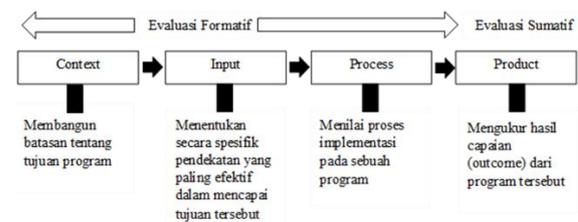
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP) yang ditujukan untuk mengembangkan komponen-komponen yang ada didalam sebuah program guna memperoleh manfaat yang lebih baik. Di sisi lain, penilaian dari konteks Flood Risk Manajemen (FRM) mencoba menyatukan komponen-komponen tersebut menjadi sebuah realisasi tindakan pencegahan bencana yang efektif. Kedua model analisis ini berbeda dengan model yang diterapkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti Djunaedi dan Swasto (2016); Rinawati dan Sukmawati (2020); atau Setyawani dan Pambudi (2020) yang mana analisis didalam penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek program secara parsial. Oleh karena itu, kedua analisis ini diharapkan mampu melengkapi dan mengevaluasi secara holistik program DESTANA dengan harapan dapat menyajikan saran perbaikan untuk meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, metode utama dalam pengumpulan datanya adalah menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan kepada sejumlah narasumber di beberapa instansi terkait pelaksanaan program DESTANA di Desa Sirnobojo, kab. Pacitan. Beberapa instansi tersebut, terdiri dari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan, Kantor Desa Sirnobojo, serta beberapa LSM yang terlibat didalam melaksanakan penanggulangan bencana di desa tersebut. Selain itu, metode observasi dan pengumpulan

data yang berbasis dokumen juga dilakukan guna mendukung nilai relevansi hasil wawancara tersebut.

Selanjutnya pada bagian analisis, penelitian dalam artikel ini mengacu pada sebuah model evaluasi yaitu model evaluasi *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP) akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai komponen-komponen program kebencanaan pada program DESTANA di desa Sirnobojo, Kab. Pacitan.



Gambar 1. Model CIPP

Sumber: Robinson (2002) Sumber diolah

Menurut Stufflebeam dan Zhang (2017), model CIPP adalah model yang dikembangkan dengan tujuan untuk menggunakan evaluasi bukan hanya sebagai bahan untuk membuktikan capaian keberhasilan melainkan sebagai bahan untuk memperbaiki kekurangan berdasarkan irisan dari masing-masing komponen program. Evaluasi ini berangkat dari pemahaman pengambilan keputusan yaitu mengenai keputusan apa yang diambil, oleh siapa dilakukan, kapan dilakukan, serta data apa saja yang dapat dijadikan alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil pemetaan alternatif pengambilan keputusan dari model CIPP tersebut informasi akan disandingkan dengan kerangka FRM sebagai alat analisis teoritis. Sehingga wujud alternatif pengambilan keputusan yang ditawarkan dalam program DESTANA di desa Sirnobojo akan dapat dilihat apakah telah sesuai dengan masing-masing komponen FRM atau dapat menghasilkan temuan lain yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012, komponen yang pertama dari adanya program DESTANA adalah legislasi yang merupakan suatu kegiatan penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

### a) Legislasi

Pembentukan peraturan desa tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam segala

kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana di desa Sironoboyo. Menurut keterangan salah satu perangkat desa setempat menyebutkan:

*“...di sini (desa Sironoboyo) pembentukan peraturan sudah dilakukan sejak lama, karena itu yang utama, kalau ada peraturan yang tertulis nanti kegiatan dilapangan bisa lancar”.*

Informasi ini juga didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa program DESTANA yang terbentuk sejak tahun 2012 tersebut sudah sesuai peraturan desa tentang penanggulangan bencana.

Lebih lanjut, informasi dari kepala desa Sironoboyo juga menyebutkan bahwa kegiatan tentang penanggulangan bencana dan pengurangan resiko dituangkan ke dalam peraturan desa misalnya, Peraturan Desa Sironoboyo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman desa tangguh bencana, Peraturan Desa Sironoboyo Nomor 09 tentang mobil siaga, Peraturan Kepala Desa Sironoboyo nomor 01 tahun 2012 tentang penjabaran pedoman desa tangguh bencana, Serta Peraturan Desa Sironoboyo Nomor 08 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa. Kegiatan dalam menyusun peraturan ini harus sesuai dengan keputusan bersama.

#### b) Perencanaan

Disamping dari segi peraturan, aspek selanjutnya yang ditemukan di lapangan menggarisbawahi pentingnya sebuah perencanaan yang matang. Menurut informasi dari salah satu perangkat desa Sironoboyo:

*“...dari peraturan desa yang dibentuk sebelumnya itu, aspek selanjutnya adalah perencanaan yang baik...didesa kita perencanaan tentang penanggulangan bencana biasanya dijadikan satu dengan rencana pembangunan desa, jadi selalu sinergi”.*

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dipahami bahwa proses perencanaan program merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan pelaksanaan suatu program. Informasi tersebut juga selaras dengan data primer yang diperoleh dari BPBD kabupaten Pacitan, yang menyebutkan:

*“...perencanaan dalam program pengurangan risiko bencana (PRB) harus disesuaikan dengan rencana pembangunan di daerah setempat. Sehingga tidak terjadi adanya kegiatan yang tidak selara”.*

Disamping itu, setiap program yang dilaksanakan di setiap desa Sironoboyo harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya dalam hal kemandirian. Untuk itu memerlukan suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat desa Sironoboyo sehingga setiap program pemerintah Desa Sironoboyo dalam penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan perencanaan diperlukan suatu metode-metode pengumpulan informasi untuk menganalisis serta mengevaluasi kebutuhan yang harus terkait dengan perencanaan dengan melakukan pendekatan melalui kegiatan sosialisai kebencanaan yang mengarah kepada perencanaan untuk kegiatan pembangunan maupun sarana-sarana penunjang kegiatan yang bersifat perencanaan dalam rangka penanggulangan bencana banjir.

Dibuatnya perencanaan tersebut untuk mempermudah semua warga desa Sironoboyo dalam menanggulangi bencana serta mempermudah masyarakat untuk memahami program desa tangguh bencana. Namun dalam hal ini pada tahun 2017 belum dibentuk rencana kontigensi. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 bahwa terdapat perencanaan kontigensi dalam program desa tangguh bencana. Belum dibentuknya rencana kontigensi tersebut berpengaruh terhadap bencana yang terjadi pada tahun 2017 karena proses evakuasi yang dilakukan menjadi terhambat.

#### c) Kelembagaan

Berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 kelembagaan merupakan kegiatan pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. Kelembagaan tersebut dapat dilihat melalui forum pengurangan resiko bencana yang sudah dibentuk di desa Sironoboyo. Melalui pembentukan forum tersebut maka harus menghasilkan dampak yang baik untuk masyarakat, karena pada dasarnya pembentukan forum tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk masyarakat, serta juga memiliki tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kebencanaan serta untuk membantu dalam penyebaran tentang program kebencanaan.

Forum pengurangan resiko bencana tersebut terdapat kader-kader desa tangguh bencana yang memiliki tugas masing-masing. Melalui keberadaan forum tersebut maka proses penyebaran informasi tentang kebencanaan dan semua kegiatan yang menyangkut kebencanaan terkait program desa tangguh bencana tersebut merupakan sebagian dari pendekatan yang dilakukan guna untuk mengajak semua masyarakat Sironoboyo untuk lebih antusias dan lebih menaruh perhatian kepada daerahnya yang rawan bencana. Kelembagaan yang sudah dibentuk melalui forum pengurangan resiko bencana dan kader-kader desa tangguh bencana tersebut melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Selain itu adanya pembentukan forum dapat menampung aspirasi warga serta memiliki rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota yang terlibat dalam forum tersebut.

#### d) Pendanaan

Berdasarkan Perka BNPB No 1 tahun 2012 bahwa program desa tangguh bencana tersebut terdapat sebuah pendanaan yang mana pendanaan diperoleh dari dari APBD kabupaten atau kota, APBDes atau ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan. Program desa tangguh bencana yang dibentuk sejak tahun 2012 tersebut pada awalnya menggunakan dana dari APBN. Namun seiring berjalannya waktu program desa tangguh bencana di desa Sironoboyo tersebut pada tahun 2017 sudah mampu untuk mendanai semua kegiatan yang berhubungan dengan program desa tangguh bencana. Antusias dari semua anggota yang tergabung dalam program desa tangguh bencana sangat baik.

Perangkat desa mengupayakan pendanaan melalui dana mandiri dari dana desa. mendanai keperluan sendiri dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja desa. Desa Sironoboyo sudah mendanai kegiatan yang berhubungan dengan program desa tangguh seperti kegiatan lomba simulasi kebencanaan, festival sungai, lomba kebersihan resiko kampung, pelatihan kader dan relawan, rabat jalur evakuasi, perbaikan dan normalisasi saluran. Dari segi pendanaan tersebut terlihat bahwa desa Sironoboyo memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mengupayakan semua kegiatan desa tangguh bencana supaya dapat terselenggara dengan baik.

#### e) Pengembangan Kapasitas

Berdasarkan Perka BNPB No 1 tahun 2012 bahwa program desa tangguh bencana tersebut terdapat pengembangan kapasitas yang merupakan kegiatan pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana. Melihat penjelasan tersebut maka Kader-kader destana atau kelompok relawan diberi pelatihan maupun simulasi terkait dengan penanganan jika terjadi bencana. Pembentukan kader-kader desa tangguh bencana tersebut merupakan langkah awal dalam terselenggaranya program tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dalam program desa tangguh bencana dengan telah dibentuknya kader-kader atau relawan desa tangguh bencana yang memiliki tugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana. Relawan tersebut dibentuk atas dasar partisipasi kesadaran dan kemampuan masyarakat desa Sironoboyo tersebut. Pengembangan kapasitas dilakukan melalui simulasi pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan. Kegiatan simulasi tersebut dilaksanakan guna untuk melatih masyarakat supaya masyarakat dapat tangguh dalam menanggulangi bencana.

#### f) Penyelenggaraan

Perka BNPB Nomor 1 tahun 2012 terdapat indikator tentang penyelenggaraan peanggulangan bencana. Selama program desa tangguh bencana dibentuk dari tahun 2012 banyak kegiatan-kegiatan dilakukan yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Proses pelaksanaan penanggulangan bencana banjir tersebut diawali dengan melakukan mitigasi. Kegiatan mitigasi tersebut diterapkan dalam Peraturan Desa dan kegiatan tersebut disepakati oleh semua kader-kader desatana maupun masyarakat desa Sironoboyo serta beberapa Dinas terkait. Adanya penyusunan kegiatan mitigasi yang dituangkan dalam Peraturan Desa tersebut maka akan mempermudah kegiatan mitigasi penanggulangan bencana banjir di desa Sironoboyo Kabupaten Pacitan. Semua kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dituangkan ke dalam peraturan desa.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut harus melewati tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi ketika terdapat potensi terjadi bencana. Tahap tersebut disusun perencanaan tindakan-tindakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan tersebut guna untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Penanggulangan bencana tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dimana semua unsur terlibat di dalamnya dengan cara meminimalisir supaya dapat mengurangi resiko ataupun dampak yang akan ditimbulkan.

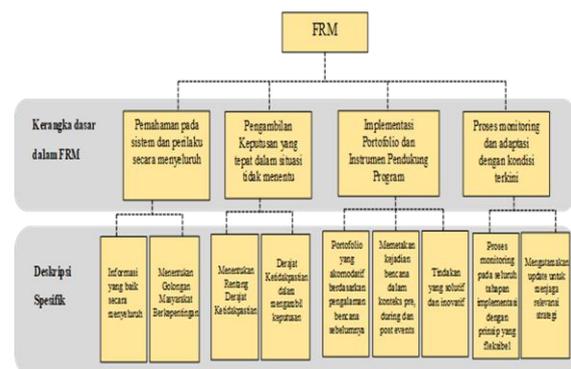
Penyebaran informasi tersebut dilakukan dilakukan dengan tujuan supaya seluruh warga desa Sirnobojo tersebut mengetahui tentang program desa tangguh bencana. Mengingat bahwa program desa tangguh bencana tersebut merupakan program yang mengedepankan kesadaran diri masyarakat tentang bahaya bencana. Sehingga perlu adanya informasi penyebaran atau pemahaman tentang desa tangguh bencana. Penyebaran informasi tersebut dilakukan sejak awal dibentuknya desa tangguh bencana pada tahun 2012 hingga sampai saat ini proses penyebaran masih dilakukan. Kegiatan tersebut tidak henti-hentinya dilakukan mengingat bahwa penanggulangan bencana merupakan kewajiban masyarakat bersama untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak yang akan ditimbulkan. Sarana penunjang kegiatan penyebaran informasi tersebut dilaksanakan oleh desa Sirnobojo untuk mempermudah dalam proses penyebaran informasi. Kegiatan yang dilakukan tersebut masih tidak membuahkan hasil yang maksimal untuk menjadikan masyarakat desa Sirnobojo tangguh.

Hasil data dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum cukup mampu untuk dikatakan tangguh. Kurangnya ketangguhan tersebut dibuktikan dengan masih terdapat berbagai macam kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program desa tangguh bencana, serta masih perlu adanya pembaruan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kurangnya ketangguhan masyarakat tersebut dibuktikan ketika terjadi bencana banjir

besar pada tahun 2017. Padahal program desa tangguh bencana tersebut sejak tahun 2012 namun masih belum menjadikan masyarakat desa Sirnobojo menjadi tangguh. Penyebaran informasi mengenai program desa tangguh bencana yang dilakukan tersebut dirasa masih belum menyeluruh.

### Efektifitas DESTANA dalam Menangani Permasalahan pada Strategi Kebencanaan

Apabila dinilai berdasarkan hasil analisis efektifitas program DESTANA desa Sirnobojo yang disandingkan dengan kosep FRM, maka dapat dipahami bahwa masih terdapat beberapa aspek yang belum ada. Namun di sisi lain, penilaian juga menunjukkan bahwa ada beberapa atribut FRM yang tidak mencakup komponen DESTANA di desa Sirnobojo. Irisan antara kedua konsep FRM sebagai alat analisis teoritis dan DESTANA sebagai implementasi praktis, telah menghasilkan beberapa temuan sebagaimana dideskripsikan pada gambar 3 berikut.



### Pemahaman pada Sistem dan Perilaku Secara Menyeluruh

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, pada kerangka dasar FRM (*Flood Risk Management*) pada aspek pemahaman pada sistem dan perilaku secara menyeluruh yang dinilai dari dua kategori penilaian yaitu informasi yang baik secara menyeluruh dan penentuan golongan masyarakat berkepentingan. Masing-masing kategori penilaian dibagi menjadi 3 atribut indikator yang terbagi sebagai berikut: 1). Dalam kategori informasi, indikator difokuskan dalam 3 hal yaitu pendataan peluang kejadian secara periodik, identifikasi akibat yang ditimbulkan dan identifikasi berbagai macam kerentanan. Dari 3 indikator penilaian FRM berikut kesemuanya sudah direncanakan dan dimasukkan dalam PRB Desa Sirnobojo.

Dalam kategori penentuan golongan masyarakat terdampak difokuskan juga dalam 3 hal yaitu, pemetaan golongan masyarakat berkepentingan yang telah direncanakan dan dimasukkan dalam PRB, Identifikasi pola interaksi untuk memaksimalkan alur informasi yang sudah ada dalam kegiatan Forum PRB dan Memperkuat konektivitas *early warning system* (EWS) yang terdapat dalam kegiatan peningkatan kapasitas warga untuk penanggulangan bencana.

### **Pengambilan Keputusan yang Tepat dalam Situasi Tak Menentu**

Sebagaimana dengan peristiwa bencana alam yang tidak menentu kapan akan terjadi maka sangat perlu merencanakan manajemen pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi tak menentu, sehingga diharapkan dari perencanaan semacam ini dapat menghindari atau mengurangi dampak negatif dari peristiwa bencana (Sayers dkk, 2013). Merujuk pada pernyataan berikut, realisasi manajemen pengambilan keputusan difokuskan dalam 3 langkah yaitu pengumpulan data terkait resiko-resiko dan perubahan situasi pada bencana-bencana sebelumnya, menentukan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menghadapi ketidakpastian yang akan dihadapi dan memperkirakan derajat ketidakpastian berdasarkan waktu (*timing*), potensi serta akibat yang ditimbulkan.

Sebagai daerah yang dikategorikan rawan dan memiliki potensi bencana banjir yang tinggi secara periodik (*Unacceptable Region*), sudah semestinya stakeholder dan kelompok kepentingan di Desa Sirnobojo memiliki data-data yang jelas terkait dengan resiko dan situasi kebencanaan. Sesuai dengan hasil data lapangan, realisasi Destana dalam upaya pengumpulan data-data terkait resiko dan situasi pasca bencana telah dirumuskan dalam RPB yang kemudian diformulasikan dalam RPD Desa Sirnobojo. Mekanisme pengumpulan data berikut dilakukan dalam lokakarya dan musrenbang desa yang mengedepankan prinsip penanggulangan bencana dengan peserta meliputi Pemerintah Desa Sirnobojo, kader-kader forum PRB dan LSM terkait.

Sedangkan pada langkah selanjutnya yang lebih mendalam yaitu menentukan pertimbangan-pertimbangan untuk menghadapi ketidakpastian dan memperkirakan derajat ketidakpastian berdasarkan waktu (*timing*),

potensi serta akibat yang ditimbulkan belum dapat direalisasikan. Keterbatasan kapasitas SDM yang memadai dan minimnya kesadaran mitigasi bencana ditengarai menjadi penyebab untuk masuk dalam level ini. Perlu peningkatan kapasitas yang lebih pada SDM di level stakeholder desa hingga masyarakat secara umum terkait dengan kesadaran prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Sehingga tujuan menjadi desa tangguh bencana dapat tercapai.

### **Implementasi Portofolio dan Instrumen Pendukung Program**

Setelah merencanakan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan pengumpulan data-data kebencanaan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya kedalam bentuk portofolio dan instrumen pendukung program. Portofolio dan instrumen ini akan difokuskan dalam tujuh kategori sebagai berikut: 1). Portofolio berdasarkan kajian *multidisipliner*. 2). Portofolio yang memuat pemanfaatan teknologi, teknik, kelembagaan, dan situasi sosial. 3). Adanya portofolio yang adaptif dengan didasarkan pada kejadian-kejadian bencana masa lalu. 4). Mengadakan tindakan pencegahan yang efektif sebelum terjadinya bencana. 5). Implementasi portofolio sesuai dengan peran dan mekanismenya. 6). Proses penilaian dan evaluasi terhadap range dan alternatif pelaksanaan. 7). Ada perbaikan portofolio pada tahap post event.

Secara faktual, portofolio dalam kategori 1 sampai 7 memang sudah termuat dalam rencana kontijensi PRB desa Sirnobojo, walaupun pada kategori 6 yaitu proses penilaian dan evaluasi belum dimasukkan. Namun, secara spesifik pada tahap implementasinya masih memiliki hambatan yang berarti, misalnya pada portofolio yang memuat pemanfaatan teknologi, teknik, kelembagaan dan situasi sosial belum terimplementasikan dengan baik. Memang secara kelembagaan sudah ada dan secara formal dibentuk Forum PRB, tetapi peningkatan kapasitas yang minim akibat sumber pendanaan yang kurang menyebabkan proses sosialisasi tentang prinsip-prinsip penanggulangan bencana belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan situasi dalam menghadapi bencana banjir. Fakta ini juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi dan teknik belum diadaptasi dan dimaksimalkan dengan baik.

Pada kategori yang lain, pengadaan kegiatan mitigasi sebagai pencegahan bencana alam memang sudah diatur dalam setiap level kebijakan pemerintah. Kabar baiknya mengingat desa Sirnobojo merupakan daerah dengan ancaman bencana yang tinggi, pemerintah desa telah membuat forum-forum PRB sampai ditingkat RT/RW untuk memaksimalkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan mencegah bencana yang diformalkan dalam Peraturan Desa. Namun, mengingat kondisi demografis dan sumber pendanaan serta partisipasi masyarakat yang pasif, langkah ini tidak berjalan secara maksimal. Hal ini diperparah dengan tidak adanya evaluasi dan penilaian pada setiap kondisi dan situasi bencana terjadi. Sehingga pada setiap pasca bencana situasi sosial masih sama seperti sebelumnya.

### **Proses Monitoring dan Adaptasi dengan Kondisi Terkini**

Proses monitoring dan upaya adaptasi dengan kondisi terkini menjadi poin terakhir dalam melihat manajemen PRB pada perspektif FRM. Proses ini berguna untuk menentukan dan merencanakan tindak lanjut kedepan dalam menghadapi kondisi kebencanaan kedepan. Ada 3 substansi besar yang dikembangkan FRM terkait pengendalian bencana banjir. Ketiga substansi itu adalah tindakan solutif dan inovatif, Proses monitoring pada seluruh tahapan implementasi dengan prinsip yang fleksibel dan Mengutamakan update untuk menjaga relevansi strategi. Masing-masing substansi ini kemudian dibagi dalam atribut dengan 7 kategori berikut ini: 1). Adanya pembaharuan strategi yang inovatif dalam mengurangi risiko di masa depan yang sudah dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi terkini di desa Sirnobojo. 2). Perubahan paradigma monitoring dan evaluasi yang secara fleksibel dapat diterapkan berdasar hasil evaluasi kejadian bencana-bencana sebelumnya. 3). Menyisipkan prinsip-prinsip adaptif dalam proses implementasi yang belum termuat dan tidak ada dalam Destana di desa Sirnobojo. 4). Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembuatan keputusan di masa mendatang yang dalam realisasinya berguna sebagai dasar penyusunan Rencana Kontijensi dan PRB di tahun berikutnya. 5). Adanya update berkala tentang strategi yang lebih relevan dengan kondisi terkini yang terealisasi dalam pembaharuan

renstra setiap periode. 6). Memungkinkannya perubahan strategi dalam situasi darurat yang dimungkinkan dalam kondisi darurat. 7). Pengadopsian nilai-nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dalam update strategi terkini yang termuat dalam rencana kontijensi.

### **PENUTUP**

Desa Sirnobojo di Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang rawan terhadap bencana-bencana alam terutama banjir yang secara periodik terjadi. Daerah ini mengalami bencana berikut dikarenakan secara ekologis terletak dalam himpitan Daerah Aliran Sungai Grindulu dan Sungai Sirnobojo juga hanya berjarak 2km dari pesisir Samudra Hindia. Sehingga menempatkan Desa Sirnobojo sebagai daerah dengan kategori rawan bencana (*Unacceptable Region*). Secara faktual diperlukan manajemen penanggulangan kebencanaan yang konkrit untuk menjadikan Desa Sirnobojo sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana) sesuai dengan Perka PNPB No. 1 Tahun 2012.

Pada tahap implementasi Destana di desa Sirnobojo secara legislasi sudah memenuhi aspek penilaian PNPB dengan tindak lanjut meratifikasi setiap regulasi ditingkat pusat dan daerah kedalam Perdes. Berikutnya, pada bagian perencanaan masih perlu dikembangkan karena dalam periode terakhir belum ditemukan perencanaan sesuai kondisi terkini. Pada bagian kelembagaan sudah bagus karena sudah membuat dan meformalisasi struktur forum-forum PRB ditingkat RT/RW yang beranggotakan masing-masing kelompok perempuan dan kelompok rentan yang di Sahkan dalam Perdes. Pada sektor pendanaan masih mengandalkan bantuan dari badan-badan ditingkat pusat dan daerah, sehingga kadang menghambat kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Pada bagian peningkatan kapasitas telah dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi di masyarakat, dibantu pula dengan rekrutmen kader-kader kebencanaan dan relawan. Terakhir pada bagian penyelenggaraan dimana ini merupakan proses akhir seluruh proses berikut dan sudah dilakukan dalam mitigasi bencana yang sering dilakukan.

Pada bagian analisis FRM menunjukkan bahwa beberapa realisasi Destana yang telah dilakukan di Desa Sirnobojo belum ada dalam kerangka dasar FRM yang meliputi belum

adanya pertimbangan atau indikator tertentu dalam menunjukkan derajat situasi kondisi bencana. Belum adanya derajat ketidakpastian secara waktu, potensi dan akibat yang ditimbulkan. Belum adanya proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan dan yang terakhir belum adanya penyisipan prinsip-prinsip adaptif dalam implementasi program PRB di Desa Sirnobojo. Temuan ini kiranya dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan memperbaiki kondisi yang ada guna mencapai Desa Tangguh Bencana Utama seperti yang diharapkan masyarakat Desa Sirnobojo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. R., Yulianti, G., Yunus, R., Wiguna, S., Adi., A. W., Ichwana, A. N., Randongkir, R. E., dan Septian, R. T. 2016. Buku RBI (Risiko Bencana Indonesia). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Url: [https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/Buku%20RBI\\_Final\\_low.pdf](https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/Buku%20RBI_Final_low.pdf) (Diakses pada 1 Juli 2021)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- Bahadori, M., Khankeh, H. R., Zaboli, R., dan Malmir, I. 2015. Coordination in Disaster: A Narrative Review: International Journal of Medical Reviews. Vol.2, No.2, pp 273-281.
- Danar, O. R., Pushpalal, D. 2014. *Building Community Resilience: Conceptual Framework and its Application in Post Tsunami Resettlement*. Jurnal Antropologi. Volume 16
- Danar, O. R. 2020. Disaster Governance: Sebuah Pengantar. DIVA Press. Yogyakarta. ISBN: 6023919219, 9786023919215
- Danar, O. R., Kusumasari, B., dan M. R. K. Muluk., 2021. *From Phenomena to Implementation: Lesson and Challenges of Administrative Reform in Indonesia*. Journal of Public Administration Issues, No.6, Special Issues II, PP.33-50.
- Kundzewich, Z. W., dan Takeuchi, K. 1999. Flood protection and Management: Quo Vadimus?. Hydrological Science Journal. Vol.44, No.3, DOI: 10.1080/02626669909492237.
- Lane, D. A., and Down, M. 2010. The art of managing leadership for the future: leadership turbulence. Management Decision Journal. Vol. 48, No.4, 2010. Pp 512-527.
- Madaus, G. F., Scriven, M. S. dan Daniel L. Stufflebeam. 1983. *Evaluation Models Viewpoints On Educational And Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Masten, A. S., and J. Obradovic. 2008. Disaster Preparation and Recovery: Lessons from research in Human Development. Ecology and Society 1): 9. [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol13/issue1/art9/>
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Robinson, B. 2002. The CIPP Approach to Evaluation, COLLIT Project: A Background note from Bernadette Robinson, 4 May 2002. <Http://fivehokies.com/>
- Sayers, P. Y. Li, G. Galloway, E. Penning-Rowsell, F. Shen, K. Wen, Y. Chen, and T. Le Quesne. 2013. Flood Risk Management: A Strategic Approach. Paris, UNESCO.
- Supriyono, B., dan Danar, O. R. 2021. Between Rational and Uncertainty: Exploring the Finest Strategy to Manage Disaster Governance and Budgetary Perspective. Journal of Governacne and Public Policy. UMY. Yogyakarta. (Sebuah manuskrip yang telah diterima pada tanggal 12 Mei 2021)
- Stoklosa, et al. 2021. Mitigating trafficking of migrants and children through disaster risk

reduction: Insights from the Thailand flood.

Stufflebeam, L, Daniel. 2007. *CIPP Evaluation Model Checklist*. diakses pada tanggal 26 Desember 2017 melalui [www.wmich.edu/evalctr/checklist](http://www.wmich.edu/evalctr/checklist).

UNISDR. 2009. Terminology on Disaster Risk Reduction. [https://www.unisdr.org/files/7817\\_UNISDRTerminologyEnglish.pdf](https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf)

UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

UNDRR (2020). Disaster Risk Reduction in The Republic of Indonesia: Status Report 2020. Bangkok, Thailand, United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Regional Office for Asia and the Pacific

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

World Meteorological Organization. 2013. Integrated Flood Management Tools Series: Coastal and Delta Flood Management.